

DAFTAR BACAAN

- Anggraini, Ana Maria Tri, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Fuadi, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hansen, Knud, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Tema Baru 2000, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kagramanto, L. Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*, Laros, Surabaya, 2012.
- Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013.
- Prayogo, Ayudha D.dkk, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang mengatur Di Indonesia*, Partnership for Business Competition, Jakarta, 2001.
- Puspaningrum, Galuh, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Jogjakarta, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Warrasih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandanu Utama, Semarang, 2011.
- Wibowo, Destivano dan Sinaga, Harjon, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Yani, Ahmad Dan Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis dan Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 jo. Perkom No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PUTUSAN

Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2009 Taksi Bandara Hasanuddin Makassar.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 141 K/Pdt.Sus/2011.

WEBSITE

Jurnal Anti Monopoli Tinjauan Mengenai Pengaturan Monopoli Berdasarkan Hukum (*Monopoly by Law*), <http://hendahlahyunitakusiandari.blogspot.com/>, diakses tanggal 10 Januari 2014.

KPPU Lansir Pedoman Monopoli, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 14 Januari 2014.

Geliat Monopoli Taksi di Tiga Bandara Internasional, www.hukumonline.com, dikutip tanggal 14 Januari 2013.

<http://lubisgrafura.wordpress.com/2009/02/07/pendekatan-metode-dan-teknik/>, diakses tanggal 15 Januari 2013.

Konsepsi Penyalahgunaan Posisi Dominan, <http://budiyana.wordpress.com>, Diakses tanggal 19 maret 2014.

<http://novapt.blogspot.com/>, diunduh tanggal 9 April 2014.

Permasalahan Hukum Acara Persaingan Usaha, <http://alisarjuni.blogspot.com>. Diakses tanggal 13 April 2014.

SKRIPSI

Nonih Rimadewi, “Indikasi Adanya Monopoli Dalam Penyediaan Jasa Taksi Di Bandara Internasional Juanda Oleh Primer Koperasi TNI AL (PRIMKOPAL)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Mutia Anggraini, “Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.